



RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023



BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta
(Kompleks Balaikota Yogyakarta)



bappeda@jogjakota.go.id



0274 515207 / 554432



www.bappeda.jogjakota.go.id

DAFTAR ISI

Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
Bab II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN 2020	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda	40
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	43
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	46
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	59
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA	60
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	60
3.2 Tujuan dan Sasaran	64
3.3 Program dan Kegiatan	65
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	72
BAB V PENUTUP	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Target Fisik dan Keuangan Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2020	16
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah	26
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2020	42
Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2020	50
Tabel 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Bappeda Kota Yogyakarta	
Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2022	63
Tabel 3.2 Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2022	64
Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022	80

KATA PENGANTAR



Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023. Semoga dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

BAB I PENDAHULUAN

Bab I :


- Latar Belakang
- Landasan Hukum
- Maksud dan Tujuan
- Sistematika Penulisan

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.



Proses penyusunan Renja Bappeda Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 dan Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bappeda, evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Bappeda.

Selanjutnya Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2023 didasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar;
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta;
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan


Maksud:

Renja Bappeda Kota Yogyakarta adalah dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

Tujuan:

Penyusunan Renja Bappeda Kota Yogyakarta bertujuan :

- a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2023.

- 
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir.
 - c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - d. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Bappeda, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Bappeda, proses penyusunan Renja Bappeda, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Bappeda, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Bappeda, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Bappeda.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Bappeda.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2021

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Bappeda Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Yogyakarta

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2021

Bab II :

- Evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Tahun lalu dan Capaian Renstra Bappeda
- Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda
- Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda
- Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2021 dan Capaian Renstra Bappeda Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Bappeda sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Bappeda.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Bappeda Kota Yogyakarta tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2021 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 Bappeda Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 4 (empat) program, 16 (enam belas) Kegiatan, dan 52 (lima puluh dua) Sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD tahun 2021 sejumlah Rp. 12.612.755.011,- (dua belas milyar enam ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sebelas rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 12.068.974.485,- (dua belas milyar enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) atau sebesar 95,69%.

Pelaksanaan program-program Bappeda Tahun 2021 secara rinci sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan 2 (dua) indikator yaitu kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah meningkat dan ketepatan evaluasi dokumen perencanaan meningkat. Program ini dilaksanakan oleh 2 bidang yaitu Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian. Target program pada tahun 2021

adalah 92,2%, realisasi program sebesar 97,63% dan capaian kinerja program sebesar 105,89%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 700.996.625,- dengan realisasi sebesar Rp. 692.069.732,- atau sebesar Rp. 98,73%. Faktor pendorong dari keberhasilan kegiatan ini adalah Pola koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah serta komitmen dari masing-masing sub bidang dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala yang sudah di susun serta adanya evaluasi untuk percepatan serapan anggaran.

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 12 Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 393.611.880,- realisasi sebesar Rp. 392.466.166,- atau terserap 99,71%, terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :

- Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 173.597.400,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 173.272.523,- atau terserap 99,81%.
- Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 42.220.616,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 42.053.400,- atau terserap 99,60%.
- Pelaksanaan Konsultasi Publik
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 6.500.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 6.500.000,- atau terserap 100%.
- Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 5.564.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 5.502.500,- atau terserap 98,89%.
- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 19.690.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 19.600.000,- atau terserap 99,54%.
- Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 4.093.080,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 4.057.000,- atau terserap 99,12%.
- Koordinasi Penyusunan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 141.946.784,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 141.480.743,- atau terserap 99,67%.

2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 144.622.656,- terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :

- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 33.454.912,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 32.914.923,- atau terserap 98,39%.
- Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD.
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 65.779.308,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 65.289.900,- atau terserap 99,26%.
- Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 45.388.436,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 39.877.000,- atau terserap 87,86%. Anggaran yang tidak terserap adalah Sisa SHBJ honor TA menyesuaikan dengan kualifikasi TA.

3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 31.357.919,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 31.292.743,- atau terserap 99,79%.
- Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 131.404.170,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 130.229.000,- atau terserap 99,11%

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan 3 (tiga) indikator yaitu Kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia meningkat, Kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam meningkat, Kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan meningkat

Program ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) bidang yaitu bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, dan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, dengan 3 (tiga) indikator program. Target pada tahun 2021 untuk program Kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia meningkat adalah 92,2%, realisasi program sebesar 98,27%, dan capaian kinerja program sebesar 105,89%, target untuk program Kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam meningkat adalah 92,2%, realisasi program sebesar 99,06%, dan capaian kinerja program sebesar 107,44%, target untuk program Kesesuaian capaian kinerja

infrastruktur dan kewilayahan meningkat adalah 92,2% realisasi sebesar 98,57%, dan capaian kinerja program sebesar 106.90%.

Anggaran untuk program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ini sebesar Rp. 2.232.635.756,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.222.750.436,- atau sebesar Rp. 99,56%. Faktor pendorong dari keberhasilan kegiatan ini adalah Pola koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah serta komitmen dari masing-masing sub bidang dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala yang sudah di susun serta adanya evaluasi untuk percepatan serapan anggaran.

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 9 Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 412.009.340,- realisasi sebesar Rp. 411.475.615,- atau terserap 99,87%, terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :
 - a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 47.369.940,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 47.193.723,- atau terserap 99,64%.
 - b. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 43.816.760,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 43.698.323,- atau terserap 99,73%.
 - c. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 320.822.640,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 320.578.569,- atau terserap 99,92%.
2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 641.160.600,- realisasi sebesar Rp. 636.175.552,- atau terserap 99,22%, terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :
 - a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 84.590.440,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 84.018.606,- atau terserap 99,32%.
 - b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 389.889.580,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 385.762.223,- atau terserap 98,94%.
 - c. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 166.680.580,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 166.394.723,- atau terserap 99,83%.

3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 1.179.465.816,- realisasi sebesar Rp. 1.175.099.269,- atau terserap 99,63%, terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :

a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 177.370.528,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 177.310.323,- atau terserap 99,97%.

b. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 664.947.272,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 664.847.523,- atau terserap 99,98%.

c. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 337.148.016,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 332.941.423,- atau terserap 98,75%.

3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan indikator yaitu tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan. Program ini dilaksanakan oleh bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian. Target program pada tahun 2021 adalah 88%, realisasi program sebesar 100% dan capaian kinerja program sebesar 113,63%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.493.598.571,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.487.008.679,- atau sebesar Rp. 99,56%. Faktor pendorong dari keberhasilan kegiatan ini adalah Pola koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah serta komitmen dari masing-masing sub bidang dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala yang sudah di susun serta adanya evaluasi untuk percepatan serapan anggaran.

Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan 7 Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 155.761.160,- realisasi sebesar Rp. 154.750.000,- atau terserap 99,35%, terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

- Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan.

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 20.131.160,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 19.932.000,- atau terserap 99,01%.

- Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan.
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 135.630.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 134.818.000,- atau terserap 99,40%.
- 2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.
Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 464.704.840,- realisasi sebesar Rp. 464.176.943,- atau terserap 99,89%, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :
 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 464.704.840,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 464.176.943,- atau terserap 99,89%.
- 3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 406.988.720,- realisasi sebesar Rp. 406.436.400,- atau terserap 99,86%, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :
 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum.
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 203.494.360,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 203.011.800,- atau terserap 99,76%.
 - Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 203.494.360,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 203.424.600,- atau terserap 99,97%.
- 4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 466.143.851,- realisasi sebesar Rp. 461.645.336,- atau terserap 99,03%, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :
 - Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersifat Inovatif
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 383.244.503,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 381.311.189,- atau terserap 99,50%.
 - Sosialisasi dan diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 82.899.348,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 80.334.147,- atau terserap 96,91%.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator program yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappeda meningkat dengan indikator kinerja hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat . Program ini dilaksanakan di bawah koordinasi Sekretariat. Target program pada tahun 2021 adalah A. Anggaran untuk program ini terdiri dari gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 7.225.478.567,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.816.866.318,- atau sebesar 94,34%, sedangkan anggaran di

luar gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 960.045.492,- dengan realisasi sebesar 850.279.320,- atau 88,57%. Total anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 8.185.524.059,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.667.145.638,- atau 93,66%.

Program ini dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan dan 25 Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 53.916.680,- realisasi sebesar Rp. 53.827.240,- atau terserap 99,84%, terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 5.603.915,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 5.540.500,- atau terserap 98,87%.
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 4.981.980,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 4.974.000,- atau terserap 99,84%.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 43.330.785,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 43.312.740,- atau terserap 99,96%.


2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Anggaran pada Kegiatan ini di luar penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 95.312.574,- realisasi sebesar Rp. 85.619.698,- atau terserap 89,83%, terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 58.615.440,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 49.180.425,- atau terserap 83,90%. Pembayaran Gaji tidak dibayarkan selama empat bulan karena terdapat TT yang mengundurkan diri sehingga posisi tersebut kosong, Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan tidak dibayarkan selama empat bulan karena terdapat TT yang mengundurkan diri sehingga posisi tersebut kosong dan Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan tidak dibayarkan selama empat bulan karena terdapat TT yang mengundurkan diri sehingga posisi tersebut kosong.
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 30.200.040,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 30.165.723,- atau terserap 99,89%.
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 1.080.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 1.075.000,- atau terserap 99,54%.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

- Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 1.000.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 992.000,- atau terserap 99,20%.
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 1.080.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 1.015.000,- atau terserap 93,99%.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 2.837.094,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 2.699.550,- atau terserap 95,15%.
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 500.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 492.000,- atau terserap 98,40%.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.


Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 173.248.038,- realisasi sebesar Rp. 154.799.722,- atau terserap 89,35%, terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 6.208.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 5.922.650,- atau terserap 95,40%.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 88.591.508,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 78.643.395,- atau terserap 88,78%. Terdapat sisa anggaran, karena terdapat pembelian barang yang dibawah harga standar (SSH). Namun, target fisik telah terpenuhi.
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 27.871.600,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 20.224.877,- atau terserap 72,57%. Terdapat sisa anggaran, karena terdapat pembelian barang yang dibawah harga standar (SSH). Namun, target fisik telah terpenuhi.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 21.277.930,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 21.181.700,- atau terserap 99,54%.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 2.724.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 2.497.000,- atau terserap 91,67%.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 26.575.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 26.330.100,- atau terserap 99,08%.

- 
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 115.100.000,- realisasi sebesar Rp. 104.188.900,- atau terserap 90,52%, terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 115.100.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 104.188.900,- atau terserap 90,52%. Terdapat sisa anggaran, karena terdapat pembelian barang yang dibawah harga standar (SSH).

 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 108.080.000,- realisasi sebesar Rp. 106.172.744,- atau terserap 98,24%, terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp 8.225.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 8.225.000,- atau terserap 100%.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp 3.600.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 2.838.744,- atau terserap 78,86%. Anggaran tidak terserap maksimal karena menyesuaikan kebutuhan telepon kantor.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp 96.255.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 95.109.000,- atau terserap 98,81%.

 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 414.388.200,- realisasi sebesar Rp. 345.671.016,- atau terserap 83,42%, terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp 117.013.200,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 66.673.016,- atau terserap 56,98%. Anggaran tidak terserap karena menyesuaikan kebutuhan operasional kendaraan dinas, waktu pelaksanaan realisasi kurang, karena hanya 2 bulan, menyesuaikan kebutuhan dan menyesuaikan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas.

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp 8.750.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 2.487.500,- atau terserap 28,43%. Anggaran tidak terserap karena menyesuaikan kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin.

- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp 19.625.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 15.636.500,- atau terserap 79,68%. Anggaran tidak terserap maksimal karena menyesuaikan kebutuhan pemeliharaan aset tetap lainnya.

- Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp 269.000.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 260.874.000,- atau terserap 96,98%.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada table 2.1 berikut :

**REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2021**

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				
		Target Kinerja		Realisasi Renja SKPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	960,045,492.00	A	850,279,320.00	88.57%
PerencanaanPenganggaranand Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5,603,915.00		5,540,500.00	98.87%
	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 Dokumen		3 Dokumen		
	Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan PProgram dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara		
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		4,981,980.00		4,974,000.00	99.84%
	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 Dokumen		4 Dokumen		
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		43,330,785.00		43,312,740.00	99.96%
	Dokumen Evaluasi Renja OPD, Dokumen Evaluasi Renstra OPD, Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	15 Dokumen		15 Dokumen		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						

4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			58,615,440.00		49,180,425.00	83.90%
		Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47 ASN		47 ASN		
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			30,200,040.00		30,165,723.00	99.89%
		Badan Pelaksanaan Verifikasi	3 Dokumen		3 Dokumen		
6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			1,080,000.00		1,075,000.00	99.54%
		Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	5 Dokumen		5 Dokumen		
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1,000,000.00		992,000.00	99.20%
		Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen		1 Dokumen		
8	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			1,080,000.00		1,015,000.00	93.98%
		Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD	1 Dokumen		1 Dokumen		
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			2,837,094.00		2,699,550.00	95.15%
		laporan keuangan bulanan/semesteran	12 Dokumen		12 Dokumen		
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			500,000.00		492,000.00	98.40%
		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen		
Administrasi Umum Perangkat Daerah							
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6,208,000.00		5,922,650.00	95.40%
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis		5 Jenis		
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			88,591,508.00		78,643,395.00	88.77%
		Alat Tulis Kantor	50 Jenis		50 Jenis		
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			27,871,600.00		20,224,877.00	72.56%
		Toner Laserjet 87a 2 tube, Toner Laserjet 83a 2 tube, Cartridge Tinta Printer Warna 6 dos, Cartridge Tinta Printer Hitam 6 dos	13 Jenis		13 Jenis		
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			27,871,600.00		20,224,877.00	72.56%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16 Jenis		16 Jenis		
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			21,277,930.00		21,181,700.00	99.55%
		Barang Cetakan	2 Jenis		2 Jenis		
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			2,724,000.00		2,497,000.00	91.67%
		Penggadaan surat-surat/dokumen	55.000 Lembar		55.000 Lembar		
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			2,724,000.00		2,497,000.00	91.67%
		Surat Kabar	12 Bulan		12 Bulan		

16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			26,575,000.00		26,330,100.00	99.08%
		Makan dan Minum Rapat	25 Kali		25 Kali		
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Provinsi 10 kali 2 orang, Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah (Jawa) 20 kali	2 Kali		2 Kali		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			115,100,000.00		104,188,900.00	90.52%
		Monitor LED, Screen layar LCD, Tablet, Mic Meja Wireless, Thermometer with automatic handsanitizer	5 Jenis		5 Jenis		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			8,225,000.00		8,225,000.00	100.00%
		Materai dan leges buku cek	800 Buah		800 Buah		
19	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			3,600,000.00		2,838,744.00	78.85%
		Pembayaran Rekening Telepon	12 Bulan		12 Bulan		
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			96,255,000.00		95,109,000.00	98.81%
		Jasa Cleaning Service	12 Bulan		12 Bulan		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			117,013,200.00		66,673,016.00	56.98%
		Pembayaran pajak kendaraan	28 Unit		28 Unit		
		Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional, Suku Cadang alat angkutan roda 2 dan 4	27 Unit		27 Unit		
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			8,750,000.00		2,487,500.00	28.43%
		Komputer (PC), Laptop , AC Split	3 Jenis		3 Jenis		
23	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			19,625,000.00		15,636,500.00	79.68%
		Komputer, AC, Printer, Mebelair, dan Sound system	4 Jenis		4 Jenis		
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			269,000,000.00		260,874,000.00	96.98%
		Pemeliharaan gedung kantor	1 Unit		1 Unit		
PROGRAM PERENCANAAN/PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah	92.20%	700,996,625.00	97.63%	692,069,732.00	98.73%

	Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan					
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						
1	Analisis Kondisi DaerahPermasalahandan Isu Strategis Pembangunan Daerah		173,597,400.00		173,272,523.00	99.81%
	Dokumen Pengendalian Program Kegiatan Bersumber Pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan APBN Non Reguler	1 Dokumen		1 Dokumen		
	Dokumen Perencanaan Program Kegiatan Bersumber Pendanaan dari Dana Keistimewaan APBD DIY dan APBN Non Reguler	1 Dokumen		1 Dokumen		
2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		42,220,616.00		42,053,400.00	99.60%
	Dokumen Renja Perangkat Daerah 2022	1 dokumen		1 dokumen		
	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah 2021	1 dokumen		1 dokumen		
	Dokumen Review Perencanaan	1 dokumen		1 dokumen		
3	Pelaksanaan Konsultasi Publik		6,500,000.00		6,500,000.00	100.00%
	Konsultasi Publik	1 Kali		1 Kali		
4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		5,564,000.00		5,502,500.00	98.89%
	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan		
5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		19,690,000.00		19,600,000.00	99.54%
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	1 Laporan		1 Laporan		
6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		4,093,080.00		4,057,000.00	99.12%
	Pedoman Musrenbang Kewilayahan	1 Dokumen		1 Dokumen		
7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		141,946,784.00		141,480,743.00	99.67%
	Dokumen RKPD Tahun 2022	1 Dokumen		1 Dokumen		
	Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021	1 Dokumen		1 Dokumen		
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						
8	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		33,454,912.00		32,914,923.00	98.39%
	Dokumen Analisa Data	1 Dokumen		1 Dokumen		


		Dokumen Metadata Sektoral	1 Dokumen		1 Dokumen		
9	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD			65,779,308.00		65,289,900.00	99.26%
		Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Perubahan Tahun 2021 dan Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Tahun 2022	2 Dokumen		2 Dokumen		
		Pengelolaan SIM Pemberdayaan	1 Dokumen		1 Dokumen		
10	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			45,388,436.00		39,877,000.00	87.86%
		Dokumen Identifikasi Permasalahan Pembangunan	1 Dokumen		1 Dokumen		
PengendalianEvaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							
11	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			31,357,919.00		31,292,743.00	99.79%
		Pengendalian Pelaksanaan RPJMD 2022	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Pengendalian Kebijakan RKPD 2022	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Pengendalian Pelaksanaan RKPD 2021	1 Dokumen		1 Dokumen		
12	MonitoringEvaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			131,404,170.00		130,229,000.00	99.11%
		Evaluasi Hasil RPJMD 2020	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Evaluasi Hasil RKPD TW IV 2020 dan TW I, II, III 2021	4 Dokumen		4 Dokumen		
		Laporan Capaian Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2020	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020	1 Dokumen		1 Dokumen		
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			92.20%	2,232,635,756.00	98.27%	2,222,750,436.00	99.56%
Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia							

		Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam					
		Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan					
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPDRPJMD dan RKPJMD)			47,369,940.00		47,198,723.00	99.64%
		Perencanaan Sektor Pemerintahan	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Pengendalian Evaluasi Sektor Pemerintahan	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Pengelolaan Data Sektor Pemerintahan	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Pemerintahan	1 Dokumen		1 Dokumen		
2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPDRPJMD dan RKPJMD)			43,816,760.00		43,698,323.00	99.73%
		Perencanaan sektor pembangunan manusia	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Pengendalian evaluasi sektor pembangunan manusia	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Pengelolaan data sektor pembangunan manusia	1 Dokumen		1 Dokumen		
	Perencanaan dan evaluasi strategis sektor pembangunan manusia	1 Dokumen		1 Dokumen			
3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			320,822,640.00		320,578,569.00	99.92%
		Perencanaan sektor kesejahteraan rakyat	1 dokumen		1 dokumen		
		Pengendalian evaluasi sektor kesejahteraan rakyat	1 dokumen		1 dokumen		
		Perencanaan dan evaluasi strategis sektor kesejahteraan rakyat	3 dokumen		3 dokumen		
	Pengelolaan Data sektor kesejahteraan rakyat	1 dokumen		1 dokumen			
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)							
4	Koordinasi Penyusunan Dokumen			84,590,440.00		84,018,606.00	99.32%

	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPDRPJMD dan RKPD)	Perencanaan sektor perekonomian	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Pengendalian evaluasi sektor perekonomian	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Pengelolaan data sektor perekonomian	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Perencanaan dan evaluasi strategis sektorperekonomian	1 Dokumen		1 Dokumen		
5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			389,889,580.00		385,762,223.00	98.94%
		Dokumen Perencanaan Sektor Pariwisata dan Kebudayaan	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pariwisata dan Kebudayaan	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Dokumen Perencanaan dan Evaluasi strategis sektor Pariwisata dan Kebudayaan	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Dokumen Pengelolaan Data Sektor Pariwisata dan Kebudayaan	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Dokumen Pengembangan Kota Yogyakarta sebagai Kota Kreatif	1 Dokumen		1 Dokumen		
6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			166,680,580.00		166,394,723.00	99.83%
		Dokumen Perencanaan Sektor Ekonomi Kreatif	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Ekonomi Kreatif	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Dokumen Pengelolaan Data Sektor Ekonomi Kreatif	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Ekonomi Kreatif	2 Dokumen		2 Dokumen		
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan							
7	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPDRPJMD dan RKPD)			177,370,528.00		177,310,323.00	99.97%
		Dokumen Pengelolaan Data Sektor Kebinamargaan dan Perhubungan	1 dokumen		1 dokumen		

		Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Kebinamargaan dan Perhubungan	1 dokumen		1 dokumen		
		Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Kebinamargaan dan Perhubungan	2 dokumen		2 dokumen		
		Dokumen Perencanaan Sektor Kebinamargaan dan Perhubungan	1 dokumen		1 dokumen		
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			337,148,016.00		332,941,423.00	98.75%
		Dokumen Perencanaan sektor sumber daya air dan lingkungan hidup	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Pengelolaan Data Sektor Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen		2 Dokumen		
9	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPDRPJMD dan RKPD)			664,947,272.00		664,847,523.00	99.98%
		Hibah Iuran Sekber Kartamantul	1 kali		1 kali		
		Perencanaan Sektor Keciaptakaryaan dan Pengembangan Wilayah	1 dokumen		1 dokumen		
		Pengendalian Evaluasi Sektor Keciaptakaryaan dan Pengembangan Wilayah	1 dokumen		1 dokumen		
		Pengelolaan Data Sektor Keciaptakaryaan dan Pengembangan Wilayah	1 dokumen		1 dokumen		
		Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Keciaptakaryaan dan Pengembangan Wilayah	1 dokumen		1 dokumen		

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan	88.00%	1,495,098,571.00	100%	1,487,008,679.00	99.46%
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan							
1	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Buku Jurnal Jarlit	40 Buku	20,131,160.00	40 Buku	19,932,000.00	99.01%
		Dokumen Inventarisasi Hasil Penelitian di OPD	20 Buku		20 Buku		
2	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan			135,630,000.00		134,818,000.00	99.40%
		Dokumen Dewan Riset Daerah (DRD)	1 Dokumen		1 Dokumen		
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan							
3	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat			464,704,840.00		464,176,943.00	99.89%
		Dokumen Penelitian Tematis Hasil Seleksi Proposal Perguruan Tinggi Tahun 2020 Laporan Hasil Koordinasi Forum LPPM	10 Dokumen 1 Laporan		10 Dokumen 1 Laporan		
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan							
4	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum			203,494,360.00		203,011,800.00	99.76%
		Penelitian Strategis Bidang Pekerjaan Umum	2 Dokumen		2 Dokumen		
5	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman			203,494,360.00		203,424,600.00	99.97%
		Penelitian Strategis Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	2 Dokumen		2 Dokumen		
Pengembangan Inovasi dan Teknologi							
6	Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif			384,744,503.00		381,311,189.00	99.11%
		Anugerah Inovasi dan Penelitian	1 Kali		1 Kali		
		Monitoring dan Evaluasi	50 OPD		50 OPD		
7	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Perlindungan Kekayaan Intelektual	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Diseminasi Kelitbangan	3 kali	82,899,348.00	3 kali	80,334,147.00	96.91%
		Pengelolaan Tindak Lanjut Penelitian dan Pengembangan melalui Decision Support System (DSS)	1 Aplikasi		1 Aplikasi		
TOTAL				5,388,776,444.00		5,252,108,167.00	97.50%



Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2021 pada Review Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam dalam Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Bappeda Kota Yogyakarta.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2021

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Meringkat	Indeks perencanaan pembangunan	92,2 poin
---	--	--------------------------------	-----------

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2021		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	1.000.000,00	A	50.000.000,00	A	960.045.492,00	A	960.045.492,00	A	850.279.320,00	0,00%	88,97%					Sekretariat	
Perencanaan/Penganggaran/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.000.000,00		50.000.000,00		5.603.915,00	100,00%	5.603.915,00	100,00%	5.540.500,00	100,00%	98,67%						
			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD		5 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD			0,00		0,00		4.961.960,00	100,00%	4.961.960,00	100,00%	4.974.000,00	100,00%	99,84%						
			RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0,00		0,00		43.330.765,00	100,00%	43.330.765,00	100,00%	43.312.740,00	100,00%	99,96%						
			Dokumen Evaluasi Renja OPD, Dokumen Evaluasi Renstra OPD, Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 Dokumen		0 Dokumen		15 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							



Administrasi Umum Perangkat Daerah																
	11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0,00	0,00	6.206.000,00	100,00%	6.206.000,00	100,00%	5.922.650,00	100,00%	95,40%			
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 Jenis	0 Jenis		5 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%				
	12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0,00	0,00	88.591.508,00	100,00%	88.591.508,00	100,00%	78.643.395,00	100,00%	88,77%			
		Alat Tulis Kantor	0 Jenis	0 Jenis		50 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%				
		Toner Laserjet 87a 2 tube, Toner Laserjet 83a 2 tube, Cartridge Tinta Printer Wama 6 dos, Cartridge Tinta Printer Hitam 6 dos	0 Jenis	0 Jenis		13 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%				
	13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0,00	0,00	27.871.600,00	100,00%	27.871.600,00	100,00%	20.224.877,00	100,00%	72,56%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0 Jenis	0 Jenis		16 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%				
	14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			0,00	0,00	21.277.930,00	100,00%	21.277.930,00	100,00%	21.181.700,00	100,00%	99,55%			
		Barang Cetakan	0 Jenis	0 Jenis		2 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%				
		Penggadaan surat-surat/dokumen	0 Lembar	0 Lembar		55.000 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%				
	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			0,00	0,00	2.724.000,00	100,00%	2.724.000,00	100,00%	2.497.000,00	100,00%	91,67%			
		Surat Kabar	0 Bulan	0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%				
	16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0,00	0,00	26.575.000,00	100,00%	26.575.000,00	100,00%	26.330.100,00	100,00%	99,08%			
		Makan dan Minum Rapat	0 Kali	0 Kali		25 Kali		100,00%		100,00%		100,00%				
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Provinsi 10 kali 2 orang, Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah (Jawa) 20 kali	0 Kali	0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%				



Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00	0,00		115.100.000,00	100,00%	115.100.000,00	100,00%	104.155.900,00	100,00%	90,52%			
		Monitor LED, Screen layar LCD, Tablet, Mic Meja Wireless, Thermometer with automatic handsanitizer		0 Jenis	0 Jenis	5 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0,00	0,00		5.225.000,00	100,00%	5.225.000,00	100,00%	5.225.000,00	100,00%	100,00%			
		Materal dan leges buku cek		0 Buah	0 Buah	800 Buah		100,00%		100,00%		100,00%				
19	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			0,00	0,00		3.600.000,00	100,00%	3.600.000,00	100,00%	2.836.744,00	100,00%	78,55%			
		Pembayaran Rekening Telepon		0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%				
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			0,00	0,00		96.255.000,00	100,00%	96.255.000,00	100,00%	95.109.000,00	100,00%	98,81%			
		Jasa Cleaning Service		0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0,00	0,00		117.013.200,00	100,00%	117.013.200,00	100,00%	66.673.016,00	100,00%	56,98%			
		Pembayaran pajak kendaraan		0 Unit	0 Unit	25 Unit		100,00%		100,00%		100,00%				
		Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional, Suku Cadang alat angkutan roda 2 dan 4		0 Unit	0 Unit	27 Unit		100,00%		100,00%		100,00%				
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00	0,00		5.750.000,00	100,00%	5.750.000,00	100,00%	2.457.500,00	100,00%	28,43%			
		Komputer (PC), Laptop, AC Split		0 Jenis	0 Jenis	3 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%				
23	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			0,00	0,00		19.625.000,00	100,00%	19.625.000,00	100,00%	15.636.500,00	100,00%	79,65%			
		Komputer, AC, Printer, Mebelair, dan Sound system		0 Jenis	0 Jenis	4 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%				
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0,00	0,00		269.000.000,00	100,00%	269.000.000,00	100,00%	260.674.000,00	100,00%	96,98%			
		Pemeliharaan gedung kantor		0 Unit	0 Unit	1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%				
Rata-rata capaian kinerja											100,00%	89,42%				
Predikat kinerja											Sangat Tinggi	Tinggi				



Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkat	PROGRAM PERENCANAAN/PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata capaian target sasaran dan program perangkat daerah	92,40 %	0,00	96,83 %	0,00	92,20 %	700.996.625,00	92,20 %	700.996.625,00	97,63 %	692.069.732,00	105,21%	98,73%					Bid. Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase	Jumlah	100,00	0,00	0	0,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100,00%	0,00%					Bid. Penelitian

		ketepatan evaluasi dokumen perencanaan	evaluasi dokumen perencanaan yang tepat dibagi jumlah keseluruhan dokumen evaluasi yang harus disusun	%				%												Pengembangan Inovasi dan Pengendalian Daerah
--	--	---	---	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah																			
	8	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			0,00		0,00		33.454.912,00	100,00%	33.454.912,00	100,00%	32.914.923,00	100,00%	98,39%				
			Dokumen Analisa Data		0	Dokumen	0	Dokumen	1		100,00%		100,00%		100,00%				
			Dokumen Metadata Sektorai		0	Dokumen	0	Dokumen	1		100,00%		100,00%		100,00%				
	9	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD			0,00		0,00		65.779.308,00	100,00%	65.779.308,00	100,00%	65.209.900,00	100,00%	99,26%				
			Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Perubahan Tahun 2021 dan Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Tahun 2022		0	Dokumen	0	Dokumen	2		100,00%		100,00%		100,00%				
			Pengelolaan SIM Pemberdayaan		0	Dokumen	0	Dokumen	1		100,00%		100,00%		100,00%				
	10	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			0,00		0,00		45.385.436,00	100,00%	45.385.436,00	100,00%	39.677.000,00	100,00%	87,66%				
			Dokumen Identifikasi Permasalahan Pembangunan		0	Dokumen	0	Dokumen	1		100,00%		100,00%		100,00%				
Pengendalian/Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah																			
	11	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			0,00		0,00		31.357.919,00	100,00%	31.357.919,00	100,00%	31.292.743,00	100,00%	99,79%				
			Pengendalian Pelaksanaan RPJMD 2022		0	Dokumen	0	Dokumen	1		100,00%		100,00%		100,00%				
			Pengendalian Kebijakan RKPD 2022		0	Dokumen	0	Dokumen	1		100,00%		100,00%		100,00%				
			Pengendalian Pelaksanaan RKPD 2021		0	Dokumen	0	Dokumen	1		100,00%		100,00%		100,00%				
	12	Monitoring/Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			0,00		0,00		131.404.170,00	100,00%	131.404.170,00	100,00%	130.229.000,00	100,00%	99,11%				
			Evaluasi Hasil RPJMD 2020		0	Dokumen	0	Dokumen	1		100,00%		100,00%		100,00%				
			Evaluasi Hasil RKPD TW IV 2020 dan TW I, II, III 2021		0	Dokumen	0	Dokumen	4		100,00%		100,00%		100,00%				
			Laporan Capaian Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2020		0	Dokumen	0	Dokumen	1		100,00%		100,00%		100,00%				
			Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020		0	Dokumen	0	Dokumen	1		100,00%		100,00%		100,00%				
Rata-rata capaian kinerja													100,00%	98,42%					
Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					



Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkat	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia	Rata-rata capaian target sasaran Pemkot, sasaran Perangkat daerah dan program pemerintahan dan pembangunan manusia	94,20 %	0,00	98,00 %	0,00	92,20 %	2.232.635.756,00	92,20 %	2.232.635.756,00	98,27 %	2.222.750.436,00	106,29%	99,56%					Bid. PPM; Bid. Perekonomian; Bid. IPW
		Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam	Rata-rata capaian target sasaran Pemkot, sasaran Perangkat daerah dan program perekonomian dan sumber daya alam	92,40 %	0,00	97,04 %	0,00	92,20 %	0,00	92,20	0,00	99,06	0,00	107,38%	0,00%					Bid. PPM; Bid. Perekonomian; Bid. IPW
		Persentase kesesuaian capaian kinerja Infrastruktur dan kewilayahan	Rata-rata capaian target sasaran Pemkot, sasaran Perangkat daerah dan program Infrastruktur dan kewilayahan	92,40 %	0,00	98,00 %	0,00	92,20 %	0,00	92,20	0,00	98,57	0,00	106,29%	0,00%					Bid. PPM; Bid. Perekonomian; Bid. IPW

	Partisipasi Masyarakat	Dokumen Penelitian Tematis Hasil Seleksi Proposal Perguruan Tinggi Tahun 2020	0 Dokumen	0 Dokumen	10 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%										
		Laporan Hasil Koordinasi Forum LPPM	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	100,00%	100,00%	100,00%										
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan																		
4	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		0,00	0,00	203.494.360,00	100,00%	203.494.360,00	100,00%	203.011.800,00	100,00%	99,76%							
		Penelitian Strategis Bidang Pekerjaan Umum	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%										
5	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		0,00	0,00	203.494.360,00	100,00%	203.494.360,00	100,00%	203.424.600,00	100,00%	99,97%							
		Penelitian Strategis Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%										
Pengembangan Inovasi dan Teknologi																		
6	Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif		0,00	0,00	364.744.503,00	100,00%	364.744.503,00	100,00%	361.311.189,00	100,00%	99,11%							
		Anugerah Inovasi dan Penelitian	0 Kali	0 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		Monitoring dan Evaluasi	0 OPD	0 OPD	50 OPD	100,00%	100,00%	100,00%										
		Perlindungan Kekayaan Intelektual	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%										
7	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kelitbangan		0,00	0,00	62.899.346,00	100,00%	62.899.346,00	100,00%	60.334.147,00	100,00%	96,91%							
		Diseminasi Kelitbangan	0 kali	0 kali	3 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		Pengelolaan Tindak Lanjut Penelitian dan Pengembangan melalui Decision Support System (DSS)	0 Aplikasi	0 Aplikasi	1 Aplikasi	100,00%	100,00%	100,00%										
Rata-rata capaian kinerja										100,00%	99,15%							
Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							

Dari data sebagaimana tabel 2.2 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 Bappeda Kota Yogyakarta.
 - a. Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 2 urusan, 4 program dengan 7 indikator kinerja program, dan 16 kegiatan, 52 sub kegiatan dengan 102 indikator kinerja sub kegiatan.
 - b. Dari 7 indikator kinerja program, terdapat 7 indikator yang melampaui target, 1(satu) indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat .
 - c. Dari 102 indikator kinerja sub kegiatan, seluruh indikator telah memenuhi target.

2. Perkiraan Capaian Target Review Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2021 Bappeda Kota Yogyakarta.
 - a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan, 4 program dengan 7 indikator program dan 16 kegiatan, 52 sub kegiatan dengan 102 indikator kinerja sub kegiatan.
 - b. Dari 7 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 7 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra.
 - c. Dari 102 indikator kinerja kegiatan diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Yogyakarta

Bappeda Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dengan Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta maupun dengan Pemerintah DIY dan Pemerintah Pusat.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bappeda adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi :

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur;
2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

3. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Pemerintah DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta, maupun horizontal yakni antar Perangkat Daerah;
4. Menyiapkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi;
5. Memberikan informasi potensi pembangunan dan data serta informasi pembangunan;
6. Melaksanakan penelitian dan pengembangan.
7. Memfasilitasi inovasi daerah.

Upaya Bappeda dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
- 2) Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
- 3) Terselenggaranya forum Perangkat Daerah dan gabungan Perangkat Daerah;
- 4) Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
- 5) Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat Kota Yogyakarta oleh Bappeda dengan Perangkat Daerah terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

- 1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
- 2) Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan;
- 3) Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
- 4) Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu;
- 5) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 Bappeda Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Review Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap pencapaian target kinerja Bappeda Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Yogyakarta
Sampai dengan Tahun 2021


Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023
Tujuan : Meningkatkan Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	91	91,2	91,4	92	92,2	92,4	98,73	98,6	92,4	92,5
Sasaran : Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkat	Indeks Perencanaan Pembangunan	91	91,2	91,4	92	92,2	92,4	98,73	98,6	92,4	92,5

Pencapaian target Tujuan dan Sasaran Bappeda tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan “Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Perencanaan Pembangunan”, telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 98,6 dari target sebesar 92,2 dengan capaian kinerja sebesar 106,94 %;
- b. Sasaran “Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Perencanaan Pembangunan”, telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 98,6 dari target sebesar 92,2 dengan capaian kinerja sebesar 106,94 %.

2.3. Isu-isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal




terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Bappeda, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya:

1. Belum optimalnya koordinasi dan kurangnya pemahaman OPD dalam hal perencanaan kinerja maupun anggaran, serta pengakomodiran regulasi yang turun di pertengahan periode dokumen perencanaan dapat menyebabkan tidak optimalnya konsistensi perencanaan antar waktu, sehingga seringkali harus dilaksanakan perubahan pada dokumen operasionalnya.
2. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah;
5. Sinergitas pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah kurang optimal.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Bappeda di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah :

- 1) Konsistensi Perencanaan antar Waktu diperlukan pendampingan dan koordinasi intensif dalam perencanaan kinerja dan anggaran pada seluruh OPD.
- 2) Penyediaan Data dan Informasi untuk Kebutuhan Perencanaan dan Evaluasi diperlukan kesamaan pemahaman OPD terkait pentingnya kebutuhan data yang dilakukan secara berjenjang.
- 3) Dinamika Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait Perencanaan Pembangunan Daerah terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Bappeda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan mengimplementasikan perkembangan regulasi tersebut.
- 4) Perkembangan Kota Yogyakarta beserta seluruh permasalahannya diperlukan strategi tepat dan komitmen yang kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Yogyakarta beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.
- 5) Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi





dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam seiring perkembangan Kota Yogyakarta, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaian, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran. Selain itu komunikasi yang intensif dengan seluruh stakeholder maupun instansi vertikal di Kota Yogyakarta juga mutlak dibutuhkan mengingat kondusivitas Kota Yogyakarta tidak mungkin tercipta dan terpelihara tanpa dukungan dari berbagai pihak.

Sedangkan peluang bagi Bappeda dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan :

- 1) Semakin strategisnya peran Bappeda sebagai perencana dalam menentukan arah pembangunan daerah, sehingga produk perencanaan yang dihasilkan akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- 2) Regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
- 4) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- 5) Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappeda Kota Yogyakarta, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Bappeda Kota Yogyakarta sebagai berikut :

- 
- a. Pencapaian Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 yang terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta, dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta beserta indikator dan targetnya. Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan memiliki beberapa fungsi dimana salah satunya adalah perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Oleh karena itu Bappeda perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya untuk mengkoordinasikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Kota Yogyakarta.
 - b. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, diperlukan untuk memastikan kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan ditataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di perangkat daerah; memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan; serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan (sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan). Juga diperlukan sinkronisasi perencanaan terkait sumber dana, dengan melakukan identifikasi alokasi pendanaan di luar APBD Kota Yogyakarta.
 - c. Ketersediaan data dan informasi memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan dan evaluasi. Penyediaan data dan informasi diantaranya dapat dilakukan melalui koordinasi pengumpulan data serta pengoptimalan kajian penelitian dan pengembangan.
 - d. Implementasi Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun tingkat Kota Yogyakarta terkait Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam perencanaan perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan di tingkat Pusat maupun Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diantaranya kebijakan terkait :
 - 1) Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
 - 2) Badan Ekonomi Kreatif dan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional;
 - 3) Sistem Nasional Penelitian serta Pedoman Penelitian dan Pengembangan diKementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 - 4) Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.Selain regulasi / kebijakan tersebut di atas, juga perlu diperhatikan kebijakan ataupun dokumen perencanaan di Kota Yogyakarta diantaranya yaitu dokumen




Pengembangan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Kreatif, dokumen Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup, dokumen Penelitian Strategis, dokumen ARD, dokumen Penelitian Tematis, dokumen Decision Support System (DSS), Pendampingan CSR, Gandeng Gendong Kota Yogyakarta, Festival dan Anugrah Inovasi Daerah.

- e. Pengoptimalan fungsi kelembagaan Bappeda perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan untuk mendukung penilaian SAKIP Bappeda Kota Yogyakarta.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah “*Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya untuk Keberdayaan Masyarakat*” dengan empat prioritas daerah, yaitu :

1. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia** diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan penurunan angka kemiskinan. Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemic Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasaan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.
2. **Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan** ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.




Setelah dukungan terhadap SDM, dibutuhkan pengembangan untuk mendukung bertumbuhnya potensi ekonomi lokal/kewilayahan untuk bisa mendukung kehidupan masyarakat. Adanya beberapa isu terkait permukiman serta pemerataan pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mengurangi ketimpangan wilayah. Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perumahan permukiman serta kesesuaian pemanfaatan ruang yang diselaraskan dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Yogyakarta. Prioritas lingkungan hidup dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan pada usaha perbaikan kualitas air, kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dilakukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat dengan kemudahan pergerakan lalu lintas, pedestrian, dan jaringan komunikasi yang selaras dengan kota cerdas.

3. **Peningkatan Perekonomian** diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktifitas ekonomi kota Yogyakarta.

Pariwisata memiliki share yang besar dan pertumbuhan tertinggi pada Struktur PDRB Kota Yogyakarta tahun 2019. Pengembangan Sarana dan Prasarana sebagai titik ungkit baru Perekonomian Wilayah yang mendukung Pariwisata Kota Yogyakarta diupayakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Prioritas pada pariwisata ini dilakukan dalam berbagai hal. Wilayah disiapkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata, baik sebagai tujuan wisata berbasis wilayah, UMKM serta aplikasi seni dan budaya dalam peningkatan pariwisata. Perhatian kepada pelaku usaha yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata serta pengembangan berbasis wilayah, menjadi kekuatan Kota untuk meningkatkan aktifitas ekonominya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan. Kesiapan ini dilaksanakan untuk menjadi dasar bangkitan ekonomi di seluruh kota.

Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan Data tunggal, digitalisasi UMKM dan Seni Budaya dikembangkan menyempang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung Pariwisata Kota Yogyakarta.



Perekonomian yang sempat terdampak cukup membutuhkan perkuatan untuk makin memiliki daya tahan terhadap pengaruh berbagai hal. Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya tahan di bidang ekonomi. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis Kota yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah, seluruh daerah digerakkan bersama dengan kolaborasi dari stake holder pembangunan dan dalam upaya berantai untuk meningkatkan aktivitas distribusi komoditas serta kegiatan pariwisata.


4. **Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi** diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan kedalam sebelas sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan;
2. Meningkatnya kualitas pariwisata;
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
4. Menurunnya kemiskinan masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Bappeda mendukung pencapaian sasaran ke delapan, yaitu “Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Yogyakarta, Bappeda memiliki kewajiban, baik dalam mengkoordinasikan pelaksanaan prioritas perencanaan pembangunan daerah,



maupun dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target - target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel 2.4 berikut :



5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2,040,360	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	1 Laporan	4,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8,852,553,120				8,852,758,040	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	8,743,985,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	69 Orang/bulan	8,743,985,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Dokumen	61,795,080	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	7 Dokumen	62,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	37,553,040	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	1 Dokumen	37,553,040	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	1 Dokumen	1,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	500,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	1 Laporan	500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	720,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	1 Dokumen	720,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	6,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	1 Laporan	6,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	1 Dokumen	1,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



5	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						4,740,000							4,500,000	
5	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			580,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	1 Dokumen		500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan			580,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	1 Laporan		500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			1,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	1 Laporan		1,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			1,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	1 Laporan		1,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			1,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	1 Laporan		1,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			580,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	1 Dokumen		500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						476,411,770							440,000,000	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			3,950,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	1 Paket		4,970,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket			93,422,770	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	3 Paket		112,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket			24,097,800	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	2 Paket		36,100,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			58,837,200	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	2 Paket		51,100,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3,204,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		2 Dokumen	3,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	292,900,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		60 Laporan	232,830,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						166,700,000							100,000,000	
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	166,700,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		4 Unit	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						121,550,000							115,000,000	
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	9,750,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Laporan	9,225,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	13,800,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		2 Laporan	5,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	98,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Laporan	100,775,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						280,565,000							385,000,000	
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				26 Unit	159,240,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		26 Unit	198,425,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya				2 Unit	62,400,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		2 Unit	59,815,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	99 Unit	43,925,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	99 Unit	52,375,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	1 Unit	74,385,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			571,028,949						655,780,456	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			259,403,761						257,477,000	
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen	69,116,824				4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	3 Dokumen	60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	71,024,384	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	1 Dokumen	71,027,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	6,790,000				4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	1 Berita Acara	10,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	22,330,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	1 Berita Acara	23,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	90,142,553				4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	4 Dokumen	93,450,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



5	01	02	2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					103,257,412							131,526,000	
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen		97,767,412			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		2 Dokumen		91,421,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku		5,490,000			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Buku		40,105,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				208,367,776							266,777,456	
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan		30,995,400	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		3 Laporan		87,813,812	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	6 Laporan		177,372,376			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		6 Laporan		178,963,644	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1,569,358,201							1,436,731,292	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				480,706,496							362,860,040	
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen		57,371,520	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		4 Dokumen		57,371,520	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	91,721,520	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	4 Dokumen	54,181,520	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	331,613,456	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	4 Laporan	251,307,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		384,757,261							402,975,636	
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	108,124,840	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	4 Dokumen	126,124,840	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	75,055,040	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	4 Laporan	75,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	201,577,381	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	4 Laporan	201,850,796	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



5	01	03	2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah						703,894,444							670,895,616		
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			4 Dokumen		117,738,712	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		4 Dokumen		107,238,712	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Infrastruktur			4 Laporan		145,708,872	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		4 Laporan		123,208,872	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			5 Dokumen		440,446,860	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		5 Dokumen		440,448,032	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1,359,632,822								1,169,183,065	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					1,359,632,822								1,169,183,065	
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					166,461,908								150,754,120	
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik			2 Laporan		64,869,815					2 Laporan		48,779,100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan			1 Rekomendasi		101,592,093					1 Rekomendasi		101,975,020	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2022, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijarah berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Bappeda juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Pada forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Bab III :

- Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda
- Program dan Kegiatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional

yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Arah dan kebijakan makro tahun 2023 adalah ***“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”*** dengan fokus :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, untuk tahun 2023 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengangkat tema ***“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi***

Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi dan untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan dan pertahanan dan transformasi pelayanan publik.

Terkait prioritas-prioritas Pembangunan Nasional tersebut diatas, Bappeda Kota Yogyakarta sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas Pembangunan Nasional.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2023, yaitu ***"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Daya dan Produktivitas Sektor Unggulan"***. Fokus pemulihan kondisi sosial ekonomi DIY lebih diarahkan pada sektor terdampak Covid-19 meliputi: Pariwisata, Tenaga kerja, Investasi, Industri, Sosial dan Kesehatan.

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Prioritas pembangunan DIY sebagai berikut :

1. Pengurangan Gap Ketimpangan Wilayah.

2. Penurunan Kemiskinan.
3. Pemulihan Ekonomi.
4. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan, Budaya).
5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik.
6. Menjaga Daya Dukung Lingkungan.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Bappeda Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat - daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan.
3. Peningkatan Perekonomian.
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan.
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata.
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi.
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat.
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat.
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.
10. Meningkatnya Infrastruktur Wilayah.

11. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2023 ditetapkan sebagaimana tabel 3.1 berikut

Tabel 3.1
Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,73
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,70
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,20% – 5,40%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,61% - 7,57%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	54,66
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	68
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	A
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	530
		Jumlah Pelanggaran Perda	4,185

10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	89,82
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,77

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 -2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023, yaitu :***“Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah”*** dengan indikator tujuan ***“Indeks perencanaan pembangunan”***.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Bappeda Kota Yogyakarta yaitu ***“Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah”***, dengan indikator sasaran ***“Indeks Perencanaan Pembangunan”*** dan ***“Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah”*** dengan indikator sasaran ***“Hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat”***

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	92,5%	92,6%	92,7%	92,8%
		Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	90,67	90,68	90,69	90,7

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan rancangan awal RKPD, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Kota Yogyakarta pada tahun 2023 terdiri 4 (empat) rumusan program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 59 (lima puluh sembilan) sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 13.629.710.372,- (Tiga belas milyar enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah). Sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi pada Bappeda Kota Yogyakarta yaitu :

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 570.972.949,-

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari 3 Kegiatan dan 9 sub kegiatan :

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 259.347.761,-

Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu :

- Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 68.826.824,-
- Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan lainnya
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 71.024.384,-
- Pelaksanaan Konsultasi Publik
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 6.965.000,-
- Pelaksanaan Musrenbang kabupaten/Kota
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 22.389.000,-
- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 90.142.553,-

2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 103.257.412,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 97.767.412,-
- Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.490.000,-

3. Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 208.367.776,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 30.995.400,-
- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 177.372.376,-

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Anggaran untuk program ini sebesar Rp.1.860.358.201,-

Program ini dilaksanakan oleh 3 bidang yaitu Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perekonomian, terdiri dari 3 Kegiatan dan 9 sub kegiatan :

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 480.706.496,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 57.371.520,-
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 91.721.520,-
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 331.613.456,-

2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 384.757.261,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 108.124.840,-
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 75.055.040,-
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 201.577.381,-

3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 994.894.444,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 117.738.712,-
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 436.708.872,-
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 440.446.860,-

c. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.238.632.822,-

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian, terdiri dari 4 Kegiatan dan 6 sub kegiatan :

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 145.461.908,-
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
 - Pengelolaan Data kelitbangan dan Peraturan
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 64.869.815,-
 - Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 80.592.093,-
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 462.500.950,-
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 462.500.950,-
3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 306.756.924,-
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 153.378.462,-

- Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 153.378.462,-

4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 323.913.040,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

- Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 323.913.040,-

d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 9.959.746.400,-

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Badan, terdiri dari 8 Kegiatan dan 35 sub kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 57.226.510,-

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.188.860,-
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.388.860,-
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.488.860,-
- Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.488.810,-
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.488.860,-
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 41.141.900,-
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.040.360,-

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 8.790.758.040,-

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 8.743.985.000,-
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 37.553.040,-
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.000.000,-
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 500.000,-
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 720.000,-
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 6.000.000,-
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.000.000,-

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.740.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu :

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 580.000,-
- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 580.000,-
- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.000.000,-
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.000.000,-
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.000.000,-
- Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 580.000,-

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 61.795.080,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 61.795.080,-

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 476.411.770,-

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.950.000,-

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 93.422.770,-

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 24.097.800,-

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 58.837.200,-

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.204.000,-

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 292.900.000,-

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 166.700.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 166.700.000,-

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 121.550.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 9.750.000,-

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 13.800.000,-

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 98.000.000,-

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 280.565.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 159.240.000,-
- Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 62.400.000,-
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 43.925.000,-
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 15.000.000,-

Bab IV:

- Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 sebagaimana telah

diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 serta Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Secara umum Bappeda bertugas menkoordinasikan pencapaian seluruh 1 (satu) indikator tujuan dan 11 (sebelas) indikator sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Namun secara khusus, Bappeda memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan/sasaran "***Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah***", dan indikator sasaran "***Indeks Perencanaan Pembangunan***" dan "***Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah***" dengan indikator sasaran "***Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat***"
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian pengembangan inovasi dan pengendalian daerah, serta infrastruktur pengembangan wilayah dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Bappeda Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan/sub kegiatan;

7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan rancangan awal RKPD, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Kota Yogyakarta mempunyai 4 (empat) rumusan program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 59 (lima puluh sembilan) sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 13.629.710.372,- (Tiga belas milyar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah). Berikut adalah rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi pada Bappeda Kota Yogyakarta yaitu :

- e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 9.959.746.400,-

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Badan, terdiri dari 8 Kegiatan dan 35 sub kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 57.226.510,-

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.188.860,-
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.388.860,-
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.488.860,-
- Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.488.810,-
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.488.860,-

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 41.141.900,-
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.040.360,-

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 8.790.758.040,-

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 8.743.985.000,-
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 37.553.040,-
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.000.000,-
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 500.000,-
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 720.000,-
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 6.000.000,-
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.000.000,-

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.740.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu :

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 580.000,-
- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 580.000,-
- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

- Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.000.000,-
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.000.000,-
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.000.000,-
- Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 580.000,-

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 61.795.080,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 8.743.985.000,-

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 476.411.770,-

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.950.000,-
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 93.422.770,-
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 24.097.800,-
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 58.837.200,-
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.204.000,-
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 292.900.000,-

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 166.700.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 292.900.000,-

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 121.550.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 9.750.000,-
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 13.800.000,-
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 98.000.000,-

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 280.565.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 159.240.000,-
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 62.400.000,-
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 43.925.000,-
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 15.000.000,-

f. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 570.972.949,-

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari 3 Kegiatan dan 9 sub kegiatan :

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 259.347.761,-

Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu :

- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 68.826.824,-
 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan lainnya
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 71.024.384,-
 - Pelaksanaan Konsultasi Publik
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 6.965.000,-

 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 22.389.000,-
 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 90.142.553,-
2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 103.257.412,-
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 97.767.412,-
 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.490.000,-
3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 208.367.776,-
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 30.995.400,-
 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 177.372.376,-

g. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Anggaran untuk program ini sebesar Rp.1.860.358.201,-

Program ini dilaksanakan oleh 3 bidang yaitu Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, dan Bidang Perekonomian, terdiri dari 3 Kegiatan dan 9 sub kegiatan :

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 480.706.496,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 57.371.520,-

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 91.721.520,-

- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 331.613.456,-

2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 384.757.261,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 108.124.840,-

- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 75.055.040,-

- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 201.577.381,-

3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 994.894.444,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 117.738.712,-
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar 436.708.872,-
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 440.446.860,-

h. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.238.632.822,-

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian, terdiri dari 4 Kegiatan dan 6 sub kegiatan :

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 145.461.908,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

- Pengelolaan Data kelitbangan dan Peraturan
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 64.869.815,-
- Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 80.592.093,-

2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 462.500.950,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

- Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 462.500.950,-

3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 306.756.924,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

- Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 153.378.462,-

- Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 153.378.462,-
- 4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 323.913.040,-
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
 - Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 323.913.040,-

Secara rinci rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 sebagaimana table 4.1 berikut

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	01	PERENCANAAN											12,391,077,550		12,075,064,868		
5	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											9,959,746,400		9,982,553,120		
5	01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											57,226,510		85,500,000	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	5,188,860		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	5,000,000
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	3,388,860		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	2,500,000
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	2,488,860		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	3,000,000
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,488,810		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	3,000,000
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,488,860		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	3,000,000

5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	8 Laporan	100 %	41,141,900		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	65,000,000
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	2,040,360		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	4,000,000
5	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										8,790,758,040	8,790,758,040		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	69 Orang/bulan	100 %	8,743,985,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	8,743,985,000
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	37,553,040			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	37,553,040
5.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	1,000,000
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	500,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	500,000
5.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	720,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	720,000

5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	6,000,000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	6,000,000
5	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,000,000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	1,000,000
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								4,740,000				4,500,000
5	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	580,000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 01 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	580,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	500,000
5 01 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	1,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	1,000,000
5 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	1,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	1,000,000
5 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	1,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	1,000,000
5 01 01 2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	580,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	500,000

5	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							61,795,080								61,795,080
5	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	61,795,080				Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	61,795,080
5	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							476,411,770								440,000,000
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	3,950,000				Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	4,970,000
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	3 Paket	100 %	93,422,770				Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	112,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Paket	100 %	24,097,800			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	36,100,000
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Paket	100 %	58,837,200			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	51,100,000
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	3,204,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	3,000,000
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	60 Laporan	100 %	292,900,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	232,830,000
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								166,700,000					100,000,000
5 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Unit	100 %	166,700,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	100,000,000

5	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						121,550,000					115,000,000		
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	9,750,000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	9,225,000
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	13,800,000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	5,000,000
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	98,000,000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	100,775,000

7/15/22, 8:13 AM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target							
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																280,565,000			385,000,000
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	26 Unit	100 %	159,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	198,425,000						
5 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Unit	100 %	62,400,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	59,815,000						
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	99 Unit	100 %	43,925,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	52,375,000						
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Unit	100 %	15,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	74,385,000						

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Perencanaan dan pendanaan tersusun	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 % 92,50 %	1 Berita Acara	100 %	6,965,000			Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	100,00 % 92,50 %	10,000,000
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Perencanaan dan pendanaan tersusun	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 % 92,50 %	1 Berita Acara	100 %	22,389,000			Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	100,00 % 92,50 %	23,000,000
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	Perencanaan dan pendanaan tersusun	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 % 92,50 %	4 Dokumen	100 %	90,142,553			Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	100,00 % 92,50 %	93,450,000

5	01	02	2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						103,257,412				131,526,000	
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah tersusun	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 % 92,50 %	2 Dokumen	100 %	97,767,412	Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	100,00 % 92,50 %	91,421,000
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah tersusun	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 % 92,50 %	1 Buku	100 %	5,490,000	Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	100,00 % 92,50 %	40,105,000
5	01	02	2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						208,367,776				266,777,456	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah terlaksana	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 % 92,50 %	3 Laporan	100 %	30,995,400			Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	100,00 % 92,50 %	87,813,812
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah terlaksana	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 % 92,50 %	6 Laporan	100 %	177,372,376			Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	100,00 % 92,50 %	178,963,644
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								1,860,358,201				1,436,731,292	
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								480,706,496				362,860,040	
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92,50 % 92,50 % 92,50 %	4 Dokumen	100 %	57,371,520			Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	92,50 % 92,50 % 92,50 %	57,371,520

5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<p>Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan</p> <p>Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia</p> <p>Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam</p>	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<p>Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</p>	<p>92,50 %</p> <p>92,50 %</p> <p>92,50 %</p>	4 Dokumen	100 %	91,721,520	<p>Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan</p> <p>Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia</p> <p>Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam</p>	<p>92,50 %</p> <p>92,50 %</p> <p>92,50 %</p>	54,181,520
---	----	----	------	----	---	--	---	--	--	--	-----------	-------	------------	--	--	------------

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92,50 % 92,50 % 92,50 %	4 Laporan	100 %	331,613,456		Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	92,50 % 92,50 % 92,50 %	251,307,000	
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)							384,757,261					402,975,636	
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92,50 % 92,50 % 92,50 %	4 Dokumen	100 %	108,124,840		Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	92,50 % 92,50 % 92,50 %	126,124,840	

5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	<p>Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan</p> <p>Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia</p> <p>Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam</p>	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian	<p>Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</p>	<p>92,50 %</p> <p>92,50 %</p> <p>92,50 %</p>	4 Laporan	100 %	75,055,040	<p>Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan</p> <p>Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia</p> <p>Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam</p>	<p>92,50 %</p> <p>92,50 %</p> <p>92,50 %</p>	75,000,000
---	----	----	------	----	---	--	--	--	--	--	-----------	-------	------------	--	--	------------

7/15/22, 8:13 AM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92,50 % 92,50 % 92,50 %	4 Laporan	100 %	201,577,381		Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	92,50 % 92,50 % 92,50 %	201,850,796	
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								994,894,444				670,895,616	
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	92,50 % 92,50 % 92,50 %	4 Dokumen	100 %	117,738,712		Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	92,50 % 92,50 % 92,50 %	107,238,712	

5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	<p>Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan</p> <p>Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia</p> <p>Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam</p>	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPIJMD pada Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<p>Kota Yogyakarta,</p> <p>Semua Kecamatan,</p> <p>Semua Kelurahan</p>	<p>92,50 %</p> <p>92,50 %</p> <p>92,50 %</p>	4 Laporan	100 %	436,708,872	<p>Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan</p> <p>Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia</p> <p>Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam</p>	<p>92,50 %</p> <p>92,50 %</p> <p>92,50 %</p>	123,208,872
---	----	----	------	----	---	--	--	---	--	--	-----------	-------	-------------	--	--	-------------

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92,50 % 92,50 % 92,50 %	5 Dokumen	100 %	440,446,860			Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	92,50 % 92,50 % 92,50 %	440,448,032
5 05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						1,238,632,822					1,169,183,065	
5 05 02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						1,238,632,822					1,169,183,065	
5 05 02 2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						145,461,908					150,754,120	
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Skor rata-rata inovasi perangkat daerah Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,76 (sangat inovatif) skor 91,00 %	2 Laporan	100 %	64,869,815			Skor rata-rata inovasi perangkat daerah Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	63,76 (sangat inovatif) skor 91,00 %	48,779,100
5 05 02 2.01 13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Skor rata-rata inovasi perangkat daerah Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,76 (sangat inovatif) skor 91,00 %	1 Rekomendasi	100 %	80,592,093			Skor rata-rata inovasi perangkat daerah Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	63,76 (sangat inovatif) skor 91,00 %	101,975,020

5	05	02	2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan							462,500,950							470,480,190
5	05	02	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Skor rata-rata inovasi perangkat daerah Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,76 (sangat inovatif) skor 91,00 %	7 Dokumen	100 %	462,500,950			Skor rata-rata inovasi perangkat daerah Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	63,76 (sangat inovatif) skor 91,00 %	470,480,190
5	05	02	2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan							306,756,924						257,523,150	
5	05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Skor rata-rata inovasi perangkat daerah Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,76 (sangat inovatif) skor 91,00 %	2 Dokumen	100 %	153,378,462			Skor rata-rata inovasi perangkat daerah Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	63,76 (sangat inovatif) skor 91,00 %	103,761,575

7/15/22, 8:13 AM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 05 02 2.03 11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Skor rata-rata inovasi perangkat daerah Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,76 (sangat inovatif) skor 91,00 %	2 Dokumen	100 %	153,378,462			Skor rata-rata inovasi perangkat daerah Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	63,76 (sangat inovatif) skor 91,00 %	153,761,575
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi								323,913,040					290,425,605
5 05 02 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Skor rata-rata inovasi perangkat daerah Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Terciptanya Inovasi untuk percepatan pembangunan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,76 (sangat inovatif) skor 91,00 %	3 Laporan	100 %	323,913,040			Skor rata-rata inovasi perangkat daerah Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	63,76 (sangat inovatif) skor 91,00 %	290,425,605
TOTAL									13,629,710,372					13,244,247,933

**BAB V
PENUTUP**

Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Bappeda Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perumusan program , kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Bappeda pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Bappeda ini berpedoman Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan output / keluaran kegiatan sebagai mandatory dari Kepmendagri Nomor 50-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Bappeda.
3. Penyusunan Renja Bappeda ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
4. Renja Bappeda ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan juga review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur;
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023.

Selanjutnya program , kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Bappeda

Kota Yogyakarta, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2023.

Yogyakarta, 2023
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta

Agus Tri Haryono, ST, MT.
NIP 19720306 199603 1 004.